

PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN DI JAWA BARAT

Ugin Lugina

Pengawas PAI SMA Kabupaten Kuningan

Email: uginlugina@yahoo.co.id

DOI 10.5281/zenodo.3552005

Abstrak

Pesantren sebagai sebuah "institusi budaya" yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren memosisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Potensi ekonomi sangat besar dengan jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (Puskopontren) Jawa Barat dan kantor wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jabar menggelar magang usaha bagi 204 santri. Pengembangan potensi ekonomi di pesantren Jawa Barat dengan jumlah pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri

Kata Kunci : Ekonomi Pondok Pesantren, Puskopontren

Abstract

Pesantren as a "cultural institution" born on the initiative and initiative (figure) of society and is autonomous, since its inception is a strategic potential that exist in the social life of society. Although most pesantren have positioned themselves only as educational and religious institutions, but since the 1970s several pesantren have attempted to reposition in addressing various social issues of society, such as economic, social, and political. The economic potential is huge with the number of pesantrens in western reply reaching 4, 328 pieces with the number of santri over 5 million people is a giant force when developed. For that the center of pesantren cooperative (puskopontren) West Java and regional office of

Ministry of Religious Affairs (Kemenag) Jabar held apprenticeship for 204 santri. Development of economic potential in West Java pesantren with the number of thousands pesantren need to be empowered through the development of economic potential, by utilizing human resources students so as to create self-reliance pesantren itself.

Keywords: *Economic Pesantren, Puskopontren*

PENDAHULUAN

Dalam hitungan matematis ekonomis, pesantren dan masyarakat pedesaan adalah bagian yang dihitung miskin. Hal ini karena lingkungan pedesaan dikenal lambat dalam segi pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat desa dan pesantren termasuk perlu dibantu. Pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar 7,73 persen, turun menjadi 7,72 persen pada Maret 2017. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2016 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 13,93 persen pada Maret 2017. Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara, di daerah pedesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sebesar 73,31 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2016 yaitu sebesar 73,19 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), dan bawang merah. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, kesehatan, dan perlengkapan mandi (Badan Pusat Statistik 2017).

Perhatian pemerintah untuk menumbuh kembangkan sifat kewirausahaan di pondok pesantren semakin tampak jelas, dapat dilihat dengan diluncurkannya berbagai program menuju kearah tersebut, semua itu dilakukan agar mutu keilmuan yang menjadi pokok utama pengelola pondok pesantren dapat benar-benar terealisasi di masyarakat setelah santri-santriwati menyelesaikan pendidikan mereka dipontren bersangkutan.

Untuk menciptakan santri yang memiliki jiwa kewirausahaan tersebut, tentu harus dibekali dengan keterampilan hidup, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilannya menjadi lapangan usaha baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Menyikapi hal ini, saya mendeskripsikan beberapa masalah dalam pembahasan ini diantaranya 1) Apa pengertian potensi ekonomi pesantren? 2) Apa saja macam-macam potensi ekonomi pesantren? 3) Bagaimana model-model pengembangan ekonomi pesantren?

PEMBAHASAN

1. Pengertian potensi ekonomi pesantren

Pesantren sebagai sebuah “ institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat (Binti Maunah 2009). Kendati kebanyakan pesantren memposisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Potensi ekonomi sangat besar dengan jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (puskopontren) Jabar dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar menggelar magang usaha bagi 204 santri. Sebanyak 204 santri yang berasal dari 68 pesantren di Jawa Barat mengikuti pemagangan santri ponpes selama sebulan (Fitri 2014). Pemagangan untuk memberikan pelatihan berusaha sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki para santri dilatih mengelola pusat informasi bisnis perkulakan dan distribusi barang di sejumlah tempat.

Potensi dan peran pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai *agent of social change*, sekaligus sebagai pelopor kebangkitan ekonomi umat. Hal ini, terlihat setidaknya bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya, dengan dibentuknya kelompok Wirausaha Bersama (KWUB) antarpesantren maupun antarpesantren dengan masyarakat, dan pembentukan forum komunikasi pengembangan ekonomi kerakyatan (FKPEK), meski diakui, keberadaan lembaga ini masih dalam tahap permulaan (Muttaqin 2016).

Kiprah pesantren dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari partisipasi pesantren dalam memasyarakatkan koperasi. Di Indonesia, ide koperasi pertama kali disampaikan oleh Bung Hatta, dan mulai dikampanyekan secara luas pada tahun 1930-an. Saat itu tidak banyak masyarakat yang menyambut gagasan tersebut. Mereka tidak

peduli karena masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan terjajah, di samping belum memahami dan mengetahui kelebihan-kelebihan koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi seperti itu, pesantren menyambut baik gagasan tersebut. Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana. Akan tetapi, lambat laun koperasi pondok pesantren berkembang perekonomian di lingkungan santri. Contoh konkretnya adalah koperasi pesantren di pekalongan, Jawa Tengah, yang ikut mendorong perkembangan perdagangan batik, sehingga sempat mengundang kekaguman Bung Hatta saat itu.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pondok pesantren juga telah berjasa dalam memelopori lahirnya Lembaga Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM). Program ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997 di pesantren pabelan, Muntilan, Mgelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1979 dengan program latihan pengenalan jenis-jenis Teknologi Tepat Guna (TTG)(Jamaluddin 2012).

Selain memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan masyarakat dalam arti fisik misalnya keterampilan pesantren juga berandil besar dalam penggalakan wirausaha. Di lingkungan pesantren, para santri di didik menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha. Mereka giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah dan swasta. Para santri mau bekerja apa saja, asal halal. Tidak pernah terdengar, seorang santri kebingungan mencari lowongan pekerjaan dan terpaksa jadi penganggur.

Dengan anggapan dasar bahwa tidak semua lulusan atau keluaran pondok pesantren akan menjadi ulama atau kyai memilih lapangan pekerjaan di bidang ahgama, maka keahlian-keahlian lain seperti pendidikan keterampilan perlu dibrerikan kepada santri, sebelum santri itu terjun ke tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Di pihak lain, guna menunjang suksesnya pembangunan diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk pihak pondok pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren secara historis dan tradisi.

Pondok pesantren memang dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sekitarnya, tentu saja hal tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh dana-dana tradisional, baik itu wakaf, bantuan insidental dari pihak wali santri, pemewrintah, swasta dan masyarakat atau donatur yang lain. Untuk menanggulangi hal yang demikian inilah pentingnya keberadaan unit usaha dan pengembangan keterampilan di pondok pesantren yang diupayakan dalam menghasilkan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas serta meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Pendidikan yang demikian itu diharapkan dapat merupakan upaya pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan berguna bagi masyarakat serta mampu menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan pengembangan bangsa yang demikian luas dan berat itu, kini pemerintah dan masyarakat berusaha mengerahkan segala sumber dan kemungkinan yang ada agar pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah tersebut, maka eksistensi pondok pesantren akan lebih disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, keagamaan dan sosial itu dapat ditingkatkan partisipasinya secara lebih aktif lagi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pesantren pada realitasnya telah mampu menjadi suatu lembaga yang ampuh untuk melegitimasi otoritas dan kekuasaan kiai. Dengan pesantren itu pula kiai mampu membangun dan mengembangkan jaringan dengan masyarakat luar.

2. Macam-macam Potensi Ekonomi Pesantren

Potensi pesantren dalam menggerakkan ekonomi syari'ah ada tiga (Yakin 2014): *Pertama* ialah sebagai agen perubahan sosial di bidang ekonomi syari'ah. Di tengah arus globalisasi di seluruh dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya disorientasi manusia Muslim. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legitimasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercerabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek.

Kondisi semacam ini pada dasarnya membuat manusia modern menjadi "lelah", tertekan dan kehilangan referensi karena tuntutan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang pada dasarnya untuk memenuhi hajat hidup manusia, justru bergeser menjadi aktivitas untuk mengejar dan memuaskan selera dan bahkan keinginan (*satisfying wants*). Namun karena nafsu dan keinginan tak pernah mengenal batas, maka manusia pun tak pernah berhenti untuk mengejarnya. Inilah yang membuat manusia menjadi "lelah."

Merujuk pada kondisi inilah, pesantren pada posisi ini untuk melakukan perubahan sosial. Mengubah orientasi ekonomi masyarakat yang semula bertujuan untuk memuaskan keinginan, menjadi "cukup" dengan memenuhi kebutuhan.

Mengubah gaya hidup yang konsumernis, menjadi pola hidup yang moderat. Membingkai aktivitas ekonomi manusia modern dalam kerangka ta'abbudi (ibadah) yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Mengubah orientasi profit-oriented dan utility, menjadi orientasi maximizing masalah.

Kedua peran pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan dai yang legitimized di masyarakat. Ulama produk pesantren sangat berpotensi menjadi ulama ekonomi Islam yang sangat diperlukan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berfungsi mengawasi dan menjaga aktivitas dan program LKS tersebut sesuai dengan syariah. Disamping itu mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan dai produk lembaga non pesantren. Kelebihan lainnya mereka lebih menguasai fiqh muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syaria'ah kepada masyarakat dengan lebih baik.

Ketiga adalah peran mewujudkan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Insya Allah mereka akan ramai-ramai melakukan migrasi dari sistem ekonomi kapitalis menuju ekonomi Islam yang terbebas dari riba, maysir, gharar, risywah, dhalim, jual beli barang haram dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Pada sisi yang lain, pesantren juga dituntut kemandiriannya dari sisi ekonomi dan finansial. Dependensi pesantren secara finansial kepada pihak luar baik yang berupa kekuatan politik, birokrasi maupun kekuatan yang lain akan menggerus kemandirian pesantren. Pesantren akan lebih mudah terkooptasi dengan kepentingan tertentu jika menggantungkan kemampuan finansialnya kepada pihak lain. Oleh karenanya menjadi penting bagi pesantren untuk mempunyai unit usaha dan bisnis yang dapat menjadi sumber pemasukan bagi pesantren. Pada posisi ini, tentu unit bisnis syariah yang terbebas dari MAHGRIB (maysir, gharar, riba, risywah dan bathil) harus menjadi pilihan utama kalangan pesantren.

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang ditunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren merupakan salah satu produsen. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang

pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri (kerajinan, kecil) maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri.

Agar dapat melanjutkan eksistensinya dalam dunia usaha, maka pesantren harus berinovasi dalam pengembangan produknya. Jika hanya mengandalkan pasar tradisional yang dimiliki maka perkembangannya akan cenderung stagnan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengefisienkan faktor produksi yang dimiliki yang kemudian mengembangkan diversifikasi produk dan tenaga kerja. Dengan demikian akan memunculkan efisiensi ekonomi. Sedangkan efisiensi ekonomi mengacu pada nilai output terhadap input, atau nilai sumberdaya (faktor produksi) yang dipakai menghasilkan output tersebut. Pengukuran efisiensi ekonomis mensyaratkan nilai-nilai ditempatkan pada komoditi. Dalam analisis kesejahteraan, nilai yang ditempatkan (sebagai satuan hitung atau pengukur) pada komoditi itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh pasar sempurna. Ekonomi Italia, Delfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumberdaya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (pareto condition). Definisi kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi dimana sebagian atau semua pihak/individu takkan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela. Inilah peranan ekonomi pesantren sebagai produsen, lebih lanjut kami mengestimasi peranan pesantren dalam menyediakan output barang produksi.

Pada sisi lain, dunia pesantren juga membutuhkan optimalisasi pendidikan mereka di bidang ekonomi syariah. Hal ini perlu dilakukan agar pendidikan pesantren tetap eksis, up-to-date, dan mempunyai kekuatan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesantren perlu mengembangkan sistem pendidikannya, termasuk metodologi pengajaran dan muatan kurikulum, salah satunya dengan mengakomodasi muatan fiqh muamalah ashriyyah yang lebih mengarah pada aktivitas ekonomi kontemporer (Hakim 2014).

Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral (Gamal Abdul Nasir Zakaria 2010).

Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah umum di Indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, ponpes mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti

tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara potensial.

Di samping itu, ketika kita berbicara tentang ponpes, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari figur kiai-ulama yang memimpin ponpes tersebut. Sebab kepemimpinan kiai-ulama di ponpes adalah sangat unik, di mana mereka memakai sistem para-modern, yaitu relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan, sebagaimana dilakukan masyarakat umumnya. Ketaatan santri kepada kiai-ulama lebih dikarenakan mengharapakan barokah (*grace*), sebagaimana di pahami dari konsep sufi.

Karena itulah, salah satu daya tarik sebuah ponpes antara lain ditentukan oleh figur dan kharisma sang kiai-ulama pengasuhnya. Namun demikian disadari, bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan kiai-ulama-santri sehingga mengarah pada pola patron-klien dengan memosisikan kiai-ulama sebagai “ibu ponpes” yang memperoleh keuntungan dari *a province wide*, dan mendapatkan pengaruh dalam sektor ekonomi dan kepemimpinan politik (Haningsih 2008).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bertanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.

Dengan demikian kebudayaan dan pendidikan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling mengikat. Kebudayaan itu hidup dan berkembang karena proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri hanya dalam konteks kebudayaan. Dalam arti tertentu, kurikulum adalah rekayasa dari pembudayaan suatu masyarakat, sedangkan proses pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pembudayaan yang dinamis.

Sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan pesantren, memerlukan penanganan yang holistik (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolah umum berciri khas Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia. Karena menurut Wardiman Joyonegoro dalam Dudhijanto, manusia yang berkualitas itu setidaknya-tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (Budhijanto 2017).

Untuk itu diperlukan beberapa kemampuan sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat sekarang: (a). Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. (b). Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi. (c). Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditemph dalam waktu tertentu.

3. Model-model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Belajar daro Ponpes Ar-Raisyidah(Yakin 2014) yang telah sukses dalam pemberdayaan ekonomi Pondoknya, berawal dari pemikiran para pengurus pondok pesantren (Ponpes) tentang upaya meningkatkan pesan dan fungsi ponpes dalam berdakwah sekaligus membantu kesejahteraan para ustadz dan santri. Dari situ, awal tahun 1961 dibentuklah wadah penghimpunan impanan dari para ustadz. Wadah ini kemudian disepakati berbentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari para ustadz pondok. Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut.

Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan maupun pemodalannya dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes. Saat itulah laba koperasi (SHU) digunakan untuk kemaslahatan ponpes.

Selanjutnya, masih dalam tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 4 september 1997 berdiri pula koperasi Baitul Mal wat Tamwil (disingkat BMT) dengan menerapkan simpan pinjam pola syari'ah. BMT menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli).

Hal ini dapat dimaklumi mengingat usaha ini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dimaksudkan untuk mengikis habis para rentenir yang keberadaannya sangat meresahkan dan mencekik perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dihadapkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat.

Terkait dengan penguat dan pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan (jihad) karena kaum muslimin di indonesia sampai sekarang masih terpinggirkan.

Program penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren pada dasarnya merupakan replikasi atau penalaran keberhasilan suatu pesantren dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kepada pesantren lain yang memiliki potensi ekonomi, SDM dan dukungan pimpinan pesantren yang tinggi. Pendampingan dimulai dari kegiatan orientasi berbasis praktek, pemberian dana pengembangan ekonomi, dan proses penalaran atau replikasi serta bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini

menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.

Perlu adanya pengembangan ekonomi lebih lanjut melalui program lanjutan tentang penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren, sehingga mampu menyempurnakan program ini. Pesantren agar menjadi sebuah lembaga yang banyak diminati masyarakat yang di dalamnya tidak hanya kegiatan yang bersifat rohani, tetapi perlu terus dikembangkan dan dibina dalam penguatan potensi ekonomi pondok pesantren.

ANALISIS

Potensi dan peran pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana.

Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bertanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.

Menurut Wardiman Joyonegoro dalam (Kholil 2011), manusia yang berkualitas itu setidaknya-tidaknya mempunyai dua kompetensi, yaitu kompetensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat. pengembangan ekonomi, dan proses penulatan atau replikasi serta bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.

KESIMPULAN

Pengembangan potensi ekonomi di pesantren Jawa Barat dengan jumlah pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri. Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh

delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara potensial.

Tujuan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan menyiapkan murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.

Sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan pesantren, memerlukan penangan yang holistik (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolah umum berciri khas Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia.

Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut. Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan maupun pemodalannya dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes. Pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2017. "Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2017." *No.45/05/Th.XX,05 Mei 2017*, no. 45: 1-10. https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20170505101853.pdf.
- Binti Maunah. 2009. "Pesantren In The Perspective Social Change." *Jurnal Usuluddin* 30: 251-82.
- Budhijanto, Danrivanto. 2017. "Teori Hukum Konvergensi Di Abad Revolusi Digital." *Pikiran Rakyat*.
- Fitri, Sonia. 2014. "Mengapa Harus Pilih Pendidikan Pesantren? Ini Jawabannya." *Ditpdpontren Kemenag*. <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/berita/mengapa-harus-pilih-pendidikan-pesantren-ini-jawabannya/>.
- Gamal Abdul Nasir Zakaria. 2010. "Pondok Pesantren : Changes and Its Future." *Journal of Islamaic and Arabic Education* 2 (2): 45-52.
- Hakim, Dhikrul. 2014. "Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah ." *Religi: Jurnal Studi Islam*, no. Vol 5, No 1 (2014). Universitas Pesantren Tinggi Darul

- Ulum (UNIPDU) Jombang Jawa Timur Indonesia: 114–26. <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/religi/article/view/451>.
- Haningsih, S. 2008. “Peran Strategis Pesantren, Madrasah Dan Sekolah Islam Di Indonesia.” *El-Tarbawi* (1): 27–39. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/Tarbawi/article/view/186>.
- Jamaluddin, Muhammad. 2012. “Metamorfosis Pesantren Di Era Globalisasi .” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*. doi:10.19105/karsa.v2011.57.
- Kholil, Mohamad. 2011. “Menggagas Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim Di Indonesia.” *Media Akademika* 26 (3).
- Muttaqin, Rizal. 2016. “Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren” (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Ekonomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1 (2).
- Yakin, Nurul. 2014. “Studi Kasus Pola Manajemen Pondok Pesantren Al-Raisiyah Di Kota Mataram .” *Ulma JURNAL Studi Keislaman* 18 (4): 199–220.